

SKRIPSI

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PADA KOMINFO BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR



**HASAN HAMZAH
1310321077**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSIFAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PADA KOMINFO BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

HASAN HAMZAH
1310321077

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PADA KOMINFO BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

HASAN HAMZAH
1310321077

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 29 September 2017

Pembimbing



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., CA.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muh. Galur, S.E., M.Si

PRODI AKUNTANSI

SKRIPSI

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PADA KOMINFO BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

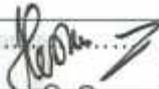
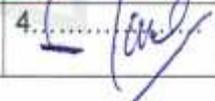
disusun dan diajukan oleh

Hasan Hamzah
1310321077

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 September 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. A. Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Nurbayani, S.E., M.S.i	Sekretaris	2..... 
3.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Abdul Samad A, S.E., M.S.i	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si
PRODI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasan Hamzah
NIM : 1310321077
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



(Hasan Hamzah)

PRAKATA

Segala puji bagi Allah yang Maha sempurna dan pencipta untuk segala pemberian yang telah diberikan berupa kesehatan, ilmu dan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini serta tak lupa pula rasa terima kasih kepada baginda Rasulullah untuk menjadi teladan saya dan saudara lainnya sehingga dalam mengerjakan skripsi ini tetap dalam rasa bersyukur walaupun banyak hambatan.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini banyak hal yang telah dilewati dan sangat panjang untuk diceritakan hanya saja ada hal yang perlu untuk tertera pada kertas putih ini agar kiranya dapat jadi kenangan dalam menempuh perjuangan selanjutnya dan yang pertama-tama dalam ucapan terima kasih yaitu kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang sangat berperan penting dalam perjuangan hidup saya “Tanpa kamu aku tak ada”.
2. Seluruh saudara saya Khatijah Hamzah, Ahmad dan Kasman yang telah membuatkan banyak pelajaran hidup bagi saya dan mendoakan saya.
3. Keluarga besar Hendrik Paulus yang sangat luar biasa baiknya dalam menerima kami dirumahnya menginap untuk mengerjakan skripsi ini sehingga mencapai hasil ini.
4. Nona “Lie Tjung Yung” yang sangat berarti dalam perkuliahan saya.
5. Om H.Ridwan Sekeluarga dan Om Rahmana Sekeluarga yang telah menjadi api semangatku dalam perkuliahan.
6. Seseorang special “WRA” yang telah mendorong dan memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, Thanks a lot.
7. Seluruh teman-teman perjuangan 2013 saya yang sangat berarti dan sangat baik khususnya pada Hendrik Paulus, Ahmad Faiz, Dirga, Wiwid, Hasrul, Fahmi, Jeremi sapet, Edwin, Surianty Kenes, Alvina Syahra, Septiani “Eccu”, Esy dedak, Dewiyanti tokbe, Fajriyanti Ndu dan Hj. Lolo “Hikmah”.
8. Seluruh teman seperjuangan SMK saya khususnya Widya Resky Anggriana, Hendrik P, Muh. Hariandi, Richardus Jo, Om Cull, Allya dan teman teman lain yang tak mampu saya sebutkan satu persatu.
9. Seluruh teman seperjuangan masa kecil saya yang memberikanku pengajaran arti kehidupan dan persahabatan.

10. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku rektor Universitas Fajar Makassar.
11. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku dekan fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Fajar Makassar.
12. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si selaku ketua Prodi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
13. Seluruh dosen yang pernah mengajariku dalam perkuliahan, dan khusus terima kasih kepada Kakanda Nafisah, Kak Wawan, dan Kak Habib yang memberikan saya perbedaan dalam belajar.
14. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., CA. yang telah membimbingku hingga skripsi saya telah mendekati kesempurnaan.
15. Seluruh staff yang ada pada UNIFA khususnya untuk Kak Juli, Kak Anto dan Pak Upa.
16. Seluruh staff yang ada pada KOMINFO BBPPKI Makassar khususnya Bapak Hosea yang sangat peduli dengan teman-teman dalam melaksanakan penelitian.
17. Seluruh teman-teman kerja yang memberikan saya kesempatan dalam mengatur jadwal perkuliahan.
18. Seluruh yang saya kenal dan tak mampu lagi saya sebutkan semuanya satu persatu.

Tiada pembalasan yang sanggup kuberikan saat ini kecuali rasa terima kasih yang mendalam dan semoga ini masih tetap dalam jalur rencana Tuhan agar saya kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga sayapun dapat membalas kebaikan kalian semua yang bukan lagi hanya kata "Terima Kasih" dan terakhir saya tutup dengan thanks yang sudah ingin membacanya sampai kata terakhir ini.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini sangatlah banyak karena saya sadar dalam penelitian ini pasti masih sangat banyak untuk dikritik dan direvisi maka dari itu saya sangat memerlukannya untuk kiranya kedepan agar lebih baik, Wassalam.

ABSTRAK

Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada Kominfo Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar

**Hasan Hamzah
Andi Kusumawati**

Penganggaran adalah hal yang mutlak untuk dilakukan tiap tahunnya agar tetap berjalan program-program yang telah direncanakan serta dalam pelaksanaannya diperlukan pertanggungjawaban sebab dana yang digunakan berasal dari Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran dan realisasi anggaran belanja modal pada KOMINFO BBPPKI. Peneliti bermotivasi dari adanya masalah dalam proses penganggaran belanja modal pada pelaksanaannya khususnya pada pejabat pengadaan serta selisih anggaran belanja modal tiap tahun. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga akan berfokus pada proses kasus serta dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, dan menjelaskan bahwa dalam proses penganggaran belanja modal berdasar pada kebutuhan dan pada pelaksanaannya menggunakan dua metode yaitu pengadaan langsung jika pengadaan dibawah dua ratus juta rupiah dan sistem lelang jika diatas dua ratus juta rupiah akan tetapi diprioritaskan terlebih dahulu untuk melakukan pengadaan melalui E-Katalog milik Pemerintah. Realisasi anggaran belanja modal untuk tahun 2015 sampai 2016 mencapai rata-rata persentase keberhasilan pengadaan sebesar 98%.

Kata Kunci: Anggaran Belanja Modal, Penyusunan Anggaran, Realisasi Anggaran

ABSTRACT

Analysis of Budget and Actual Capital Expenditures On KOMINFO BBPPKI Makassar

**Hasan Hamzah
Andi Kusumawati**

Budgeting is an absolute thing to do every year to keep running the programs that have been planned and in the implementation of accountability is required because the funds used come from the People. The purpose of this study is to find out how the process of budget preparation and realization of capital expenditure budget in KOMINFO BBPPKI. Researchers are motivated by the problems in the process of capital expenditure budgeting in its implementation, especially on procurement officers and the difference of capital expenditure budget each year. This research is qualitative so that it will focus on the process of case as well as in data collection conducted interview and observaton. The results of this study produce descriptive data, and explain that in the process of capital expenditure budgeting based on the needs and the implementation using two methods of direct procurement if procurement under 200 million and auction system if over 200 million Rupiah but prioritized first to make procurement through E Government-owned catalog. Actual capital expenditure for 2015 to 2016 reached the average percentage of procurement success of 98%.

Keywords: Capital Expenditure Budget, Budgeting, Budget Realization

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah.....	6
1.3 TujuanPenelitian	6
1.4 KegunaanPenelitian.....	6
1.4.1 KegunaanTeoritis.....	6
1.4.2 KegunaanPraktisi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Anggaran.....	8
2.1.1 DefenisiAnggaran	8
2.1.2 FungsiAnggaran	10
2.1.3 KarakteristikAnggaran.....	11
2.1.4 PendekatanPenyusunanAnggaran.....	11
2.2 Pengertian Anggaran Belanja Modal	13
2.2.1 Peran Belanja Modal.....	14
2.2.2 Jenis Belanja Modal.....	15
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal.....	17
2.3 Tinjauan Emperik.....	18
2.4 FokusPenelitian	19
2.5 KerangkaPemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Rancangan Penelitian.....	21

3.2 Kehadiran Peneliti	21
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Analisis Data.....	26
3.7 Pengecekan Validasi Data.....	27
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	28
 BAB VI Analisis dan Pembahasan	 31
4.1 Penyusunan Anggaran Belanja Modal.....	31
4.1.1 Pelaksanaan Program Belanja Modal	36
4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Lelang	41
4.2 Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal	44
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	 50
 LAMPIRAN	 51

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
4.1 PAGU DIPA 2015	43
4.2 PAGU DIPA 2016	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	21
3.1 Map Kominfo BBPPKI	23
3.2 Struktur Organisasi BBPPKI	24
3.3 Proses Tahap-Tahap Penelitian	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan adalah suatu hal yang ingin diperoleh oleh setiap individu ataupun sebuah kelompok untuk memperoleh kenyamanan dan mempertahankan kehidupannya serta dalam dunia bisnis pun dituntut seperti itu misalnya entitas yang memerlukan kebutuhan untuk tetap bertahan seperti mesin, bangunan dan kendaraan. Dalam hal menindaklanjuti sebuah kebutuhan maka diperlukan landasan yang mendorong untuk memperolehnya, atau dibuatkan terlebih dahulu perencanaan. Agar kedepannya hal-hal yang telah diputuskan dapat memperoleh hasil yang efektif serta tidak merugikan dalam perencanaan sebuah entitas maka diperlukan tinjauan terhadap hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung untuk memperlancar kerja ataupun meningkatkan kinerjanya misal dalam hal teknologi maupun infrastruktur. Pengadaan atau pemerolehan aset-aset yang dibutuhkan dalam kelancaran kerja sangatlah penting sehingga dapat meningkatkan kinerja sehingga sebuah tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dalam hal perencanaan diperlukan waktu yang agak lama dikarenakan akan adanya peninjauan lapangan dan masukan setiap staff untuk memberikan informasi akan hal apa saja kedepannya yang akan diperoleh atau dianggarkan, dalam peninjauan ini diperlukan pengalaman atau ilmu yang mendalam pada praktisi karena hal ini sangat berkaitan dengan nilai rupiah sebab setiap entitas berusaha melakukan perencanaan dengan hasil yang efektif, efisien dan ekonomis. Dalam menanggapi kebutuhan setiap staff yang telah memberikan masukan maka diperlukan *review* tujuan entitas apakah sejalan maka tolok ukur

dari sebuah kebutuhan dalam perencanaan diperlukan pemahaman secara menyeluruh yaitu pemahaman visi misi entitas, tujuan entitas dan laporan keuangan entitas agar kedepannya tidak menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang salah dalam entitas terutama dalam hal pengambilan keputusan pengeluaran dana memungkinkan saja akan terjadi penghambatan dalam pencapaian tujuan entitas dikarenakan adanya hal yang harusnya tidak diperlukan diadakan dan hal yang diperlukan ditunda pengadaannya maka hal semacam ini memerlukan evaluasi.

Pengadaan sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Riza (2015) pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dalam mensejahterakan publik. Maka dari itu pengadaan bersifat memberikan manfaat luas bukan kepada individu tertentu.

Pengadaan barang baik yang bersifat modal ataupun tidak harus sebelumnya dilakukan perencanaan maka untuk memperoleh dana agar kegiatan pengadaan berjalan haruslah dilakukan perencanaan pengadaan yang memiliki tujuan yang sama dengan entitas maka pengadaan dilakukan jika perencanaan sejalan dan selanjutnya akan dilaksanakan penganggaran.

Penganggaran modal menurut Ardiprawiro (2015) adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (*benefit*) pada waktu yang akan datang” lalu penjelasan lainnya dari Van dan Wachowicz (2012) penganggaran modal adalah proses identifikasi, analisis, dan pemilihan berbagai proyek yang pengembaliannya (arus kasnya) diperkirakan diterima lebih dari setahun

sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran modal adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperoleh barang yang sifatnya dapat digunakan dalam masa manfaat lebih dari satu periode dan dapat menambahkan nilai entitas dikarenakan adanya pengeluaran dana yang dikorbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan

kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2012).

Untuk KOMINFO BBPPKI sendiri adalah UPT atau unit pelayanan teknis, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan (PM KOMINFO Tahun 2011).

Anggaran yang dimiliki KOMINFO BBPPKI ada tiga macam yaitu anggaran belanja gaji, belanja modal dan belanja barang. Belanja gaji adalah seluruh hal yang berkaitan dengan pemberian gaji atau upah kepada staff yang berada pada naungan KOMINFO BBPPKI, anggaran belanja modal seluruh hal pengeluaran yang sifat pembelian barangnya memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan belanja barang seluruh hal pengeluaran yang sifatnya mengadakan barang dengan masa manfaat dibawah satu periode.

Pada penelitian terdahulu Basri (2012) tentang analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa realisasi anggaran badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa provinsi Sulawesi utara Tahun 2012 sebesar 95,30 % dikaitkan dengan observasi peneliti ada berapa hal yang sama yaitu persentase realisasi yang terjadi diatas 90% dimana KOMINFO BBPPKI merealisasikan anggaran rata-rata 90% pada Tahun 2015-2016 dan dapat dianalisa bahwa tiap anggaran yang direncanakan diusahakan untuk diselesaikan semaksimal mungkin.

Dalam daftar isian perencanaan anggaran menguraikan seluruh perencanaan kerja kedepannya termasuk seluruh biaya-biaya yang akan terjadi seperti belanja gaji, belanja barang dan belanja modal. Rencana pelaksanaan

anggaran tersebut ada hal yang paling mencolok dalam penganggarannya seperti belanja barang bersifat modal yang sekali pengadaannya akan sangat besar nilainya, peneliti memperoleh data bahwa pada Tahun 2013 anggaran belanja modal mencapai Rp.1.386.782.000, 2014 Rp.307.117.000, 2015 Rp.430.130.000, dan 2016 hanya Rp.66.000.000 jika dibandingkan secara keseluruhan hanya Tahun 2013 yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan hanya Tahun 2016 yang memiliki anggaran terendah berarti selisih anggaran Tahun 2016 dengan 2013 sebesar Rp.1.320.782.000 dan hal ini menjadi salah satu motivasi peneliti serta dalam realisasi anggaran tersebut banyak kendala atau prosedur yang dilalui untuk menyelesaikannya, kendala yang sering ada yaitu pada pejabat pengadaan barang dengan pejabat penerima barang yang sering dirotasi tiap pengadaannya sehingga mengakibatkan adanya asimetri informasi dan ditambah lagi dengan kurangnya perhitungan pajak untuk barang yang akan diadakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkaitan, dengan pengadaan yang mengharuskan adanya penalangan dana pribadi untuk terealisasinya perencanaan yang telah ditentukan masanya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian tentang mengenai “Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar”.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana proses penyusunan anggaran dan realisasi anggaran belanja modal pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Informatika Makassar serta berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses anggaran belanja modal pada KOMINFO BBPPKI Makassar ?
2. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja modal pada KOMINFO BBPPKI Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses anggaran belanja modal pada KOMINFO BBPPKI Makassar
2. Untuk mengetahui analisis realisasi anggaran belanja modal pada KOMINFO BBPPKI Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan anggaran belanja modal dalam hal perencanaan kedepannya lebih baik khususnya pada implementasi bagi KOMINFO BBPPKI.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penyusunan anggaran dan realisasi anggaran belanja modal pada kementerian komunikasi dan informatika balai besar pengkajian dan pengembangan dan informatika Makassar.

2. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.

3. Bagi publik

Masyarakat dapat mengetahui setiap program-program pemerintah khususnya KOMINFO BBPPKI dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

4. Bagi sektor pemerintah yang lainnya

Sebagai referensi untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat terjadi dalam pengadaan barang yang manfaatnya lebih satu periode sehingga kedepannya dapat memberikan solusi ataupun dapat mencegahnya jika terjadi dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi pemantauan program yang terjadi telah terealisasi atau belum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Nordiawan dan Hertianti (2012) anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

2.1.1 Definisi Anggaran Publik

Dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Bagi organisasi yang besar dan telah matang dengan tingkat operasional yang relatif stabil dalam jangka panjang, anggaran merupakan dokumen formal yang sangat terperinci. Anggaran merupakan alat akunting yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran yang digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian merupakan jalan terbaik bagi pimpinan perusahaan untuk menempatkan suatu organisasi pada arah tertentu.

Anggaran juga merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga anggaran dapat dirancang berdasarkan kondisi perusahaan disesuaikan dengan data tertulis mengenai seluruh kegiatan organisasi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil

pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh beberapa kalangan ahli. Tetapi pengertian tersebut pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2012) merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan menurut Bastian (2012) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu, kebanyakan organisasi publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan, contoh anggaran publik antara lain:

1. Anggaran Negara dan Daerah /APBN/APBD.
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat.

National Committee on Governmental Accounting (NCGA), yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, mendefenisikan anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang di harapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

2.1.2 Fungsi Anggaran Publik

Dalam ruang lingkup akuntansi, seperti dikutip dari Nordiawan & Hertianti (2012) anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran sektor publik. Contohnya apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan fiskal, apakah kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

2.1.3 Karakteristik Anggaran Publik

Anggaran harus disusun dan dihitung dengan cermat agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus memiliki karakteristik tertentu menurut Bastian (2012) terdiri dari:

1. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
2. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
4. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam proses penyusunan anggaran di suatu organisasi, Bastian (2012) melakukan penggolongan pendekatan anggaran:

1. Pendekatan Tradisional (*Incremental Budgeting*)

Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Logika sistem penganggaran ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.

2. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

Planning Programming Budgeting System adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di

dalamnya terkandung indentifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan, serta pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. PPBS di anggap terlalu rasional dan tentu saja terlalu mahal sehingga PPBS sulit di laksanakan.

3. Pendekatan *Zero Based Budgeting (ZBB)*

Zero Based Budgeting adalah pendekatan yang menghasilkan berbagai paket alternatif anggaran yang di buat sebagai motivasi atas anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran. Dalam prakteknya ZBB membutuhkan banyak kertas kerja data, serta menuntut penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih. Hal ini di anggap sebagai hambatan utama dalam penerapan ZBB.

4. Pendekatan Kinerja (*Performance Budgeting*)

Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance Budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output sebagai indikator kinerja organisasi. Teknik ini adalah penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan biaya unit dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaiannya tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

2.2 Pengertian Anggaran Belanja Modal

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Abdul Halim (2013) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012) belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

2.2.1 Peran Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun (2006)

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan entitas akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah atau entitas sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dengan tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.2.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Mengenai jenis-jenis Belanja modal dikategorikan menjadi lima bagian, menurut Syaiful (2013):

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan undang-undang nomor 22 Pasal 79 (1999) menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah dana alokasi umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan

pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

2.3 Tinjauan Emperik

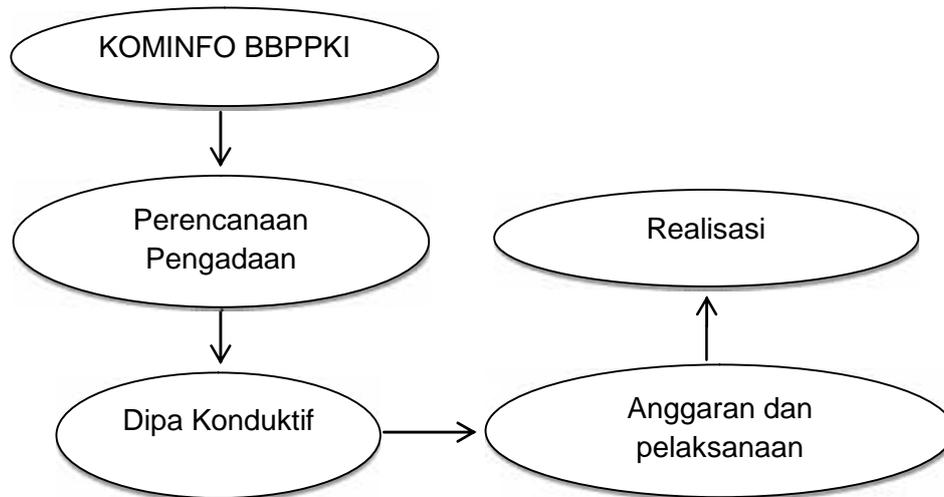
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Tahun	Judul penelitian	Hasil
1	Liando dan Elim	2016	Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kepulauan sangihe	belanja pada LRA untuk T.A 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja PemKab Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlihat pada T.A 2013 dan 2014 dibandingkan dengan T.A 2011 dan 2012. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya PemKab Kepulauan Sangihe sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta Pimpinan DPPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh

				manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.
2	Budiman dan Wokas	2015	Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada tiga daerah pemekaran di provinsi sulawesi utara	Keserasian Belanja menunjukkan untuk tahun anggaran 2009 hingga 2012 pada Pada Tiga Daerah Pemekaran Proporsi Belanja Operasi berimbang, kecuali Pemerintah Kota "X" pada T.A. 2011 yang lebih tinggi Belanja Operasi.
3	Basri	2012	Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada bpm-pd provinsi sulawesi utara	Hasil penelitian dalam pembahasan KUA/PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95,30 %.

4	Palilinga, Sabijono dan Mawikere	2015	Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan kota manado	Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dan PAD positif. Pertumbuhan PAD kota Manado dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan. Kinerja pemerintah Kota Manado dari analisis pembiayaan secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Manado sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran.
---	----------------------------------	------	---	---

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu dimana suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan hasil observasi dan menurut Indrawan dan Poppy (2016) penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian bersifat mengamati kasus. Adapun bentuk penelitiannya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu objek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variable penelitian.

Penelitian ini di gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana suatu kejadian dan melaporkan hasil sebagaimana adanya. Melalui penelitian kualitatif ini, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualisasi, realitas dan persepsi sasaran peneliti. Dalam penelitian ini penulis bertujuan ingin memahami dan mengungkapkan berbagai kejadian dalam kegiatan dan mengarah pada pengamatan aturan yang telah ditetapkan dengan fakta.

Penelitian ini dapat dikatakan penelitian etnografis sebab penelitian ini menganalisis penyusunan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika pada periode sekarang walaupun periode sebelumnya.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ini yaitu peneliti harus mampu memahami setiap masalah-masalah yang akan diteliti dan memahami setiap teknik-teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang akan digunakan. Peneliti juga harus

mengungkapkan dengan apa yang dia lihat, dirasakan dan didengar, maka untuk itu perlu dibutuhkan kepandaian dalam memahami setiap masalah serta waktu untuk tetap berada pada lingkungan tersebut agar tercapai informasi yang akurat.

Peneliti pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika Makassar merupakan partisipan penuh yang melakukan pengumpulan data secara langsung dengan cara interview dan observasi langsung pada objek diteliti, maka peneliti diketahui sebagai partisipan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebuah hal yang penting untuk dipertimbangkan sebab lokasi penelitian adalah sumber pengambilan data penelitian dan untuk lokasi penelitian yang diteliti penulis adalah Jalan Racing Centre II No. 25, Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkang 90234, Makassar. Seperti pada Map dibawah ini akan menggambarkan lokasi penelitian.

Gambar 3.1 Map KOMINFO BBPPKI



Sumber: Google Maps, 2017

Untuk Pemilihan lokasi penulis memiliki beberapa indikator untuk memilih Kementerian komunikasi dan informasi balai besar pengkajian dan pengembangan informasi dan informatika makassar sebagai tempat meneliti

yaitu Kementrian Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika adalah wadah yang disediakan pemerintah untuk melakukan penelitian seperti pada visi Kementrian Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika sendiri yaitu “Terwujudnya hasil pengkajian dan pengembangan yang lebih berkualitas serta meningkatnya kapasitas dan akses informasi masyarakat”.

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dalam sebuah instansi, adapun struktur organisasi pada Kementrian Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika Makassar yaitu:

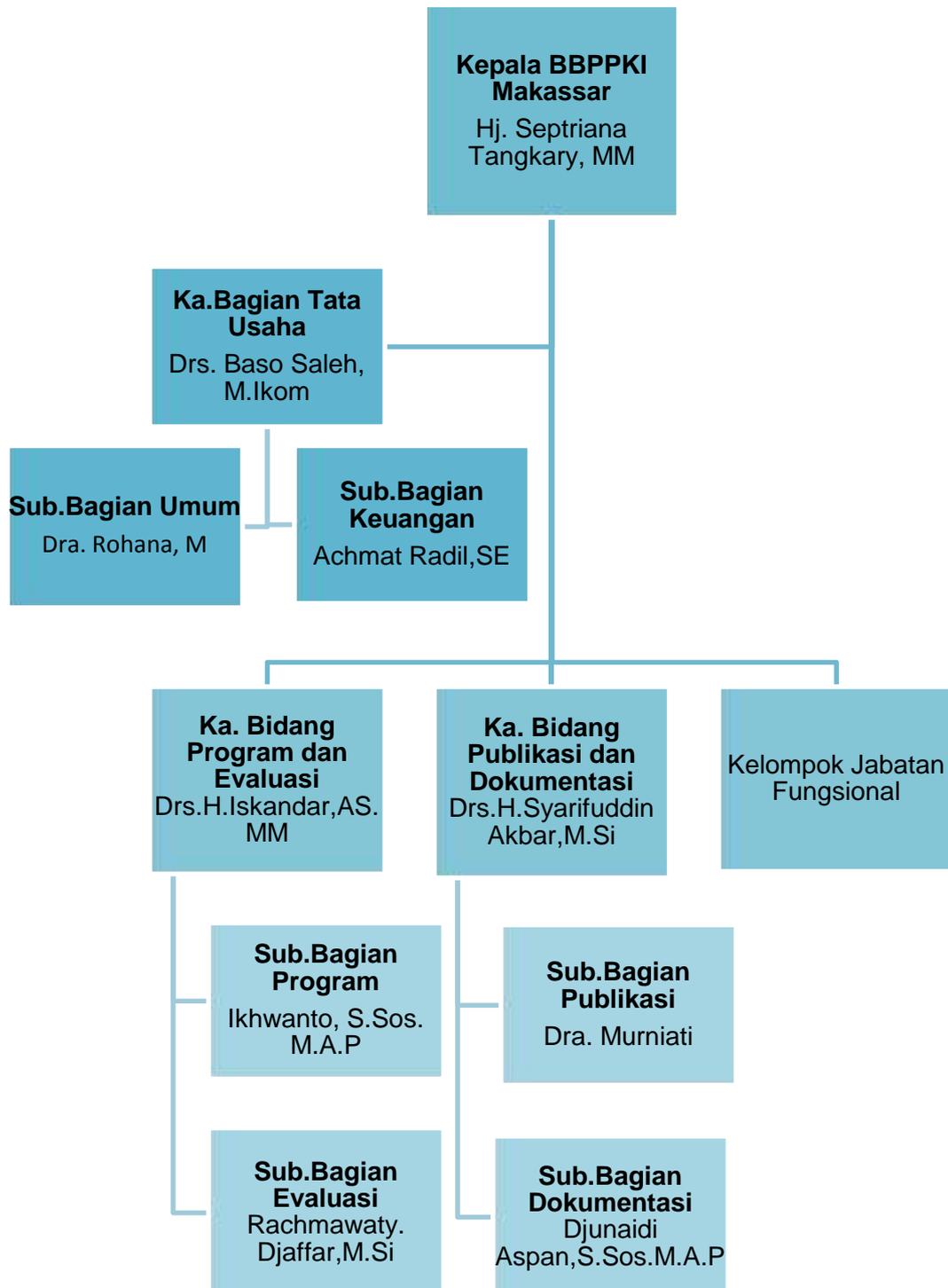
1. Kepala BBPPKI Makassar :Hj. Septriana Tangkary, MM
2. Ka.Bagian Tata Usaha :Drs. Baso Saleh, M.Ikom
3. Ka. Bidang Program dan Evaluasi :Drs.H.Iskandar,AS.MM
4. Ka. Bidang Publikasi dan Dokumentasi :Drs.H.Syarifuddin Akbar,M.Si

1. Sub.Bagian Umum :Dra. Rohana, M
2. Sub.Bagian Keuangan :Achmat Radil,SE

1. Sub.Bagian Program :Ikhwanto, S.Sos. M.A.P
2. Sub.Bagian Evaluasi :Rachmawaty. Djaffar,M.Si

1. Sub.Bagian Publikasi :Dra. Murniati
2. Sub.Bagian Dokumentasi :Djunaidi Aspan,S.Sos.M.A.P

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BBPPKI



Sumber: KOMINFO BBPPKI MAKASSAR, 2017

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam menyelesaikan dan menganalisis data dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data berupa:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, observasi, maupun wawancara langsung dengan staff pelaksana instansi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan instansi.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan, seperti daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, serta dokumen-dokumen instansi yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti laporan revisi dan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian penulisan ini, maka perlu dilakukan proses pengumpulan data yang didalamnya terdiri dari informasi-informasi yang diterima oleh penulis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan dengan penganalisan masalah, yaitu :

1. Metode Lapang

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung melalui observasi dan wawancara mendalam pada bagian isntansi, khususnya pada keuangan atau bendahara, serta sejumlah informasi yang terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap serta yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis menggunakan beberapa teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen seperti misalnya Visi dan Misi, Struktur organisasi, Keadaan karyawan bekerja.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses yang dilakukan pada tahap ini ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali apakah masih ada yang kurang atau terdapat kekeliruan. Pemeriksaan ini bermanfaat bagi keabsahan dan kesempurnaan data yang telah diperoleh serta lebih mengarah pada tingkat yang lebih lanjut. Data yang diedit oleh penulis ialah hasil wawancara antara peneliti terhadap narasumber.

2. Klasifikasi data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan data

Dilakukan dengan menempatkan data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang permasalahannya masing-masing secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang telah diperoleh. Tujuan dari analisa data ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari, kemudian dari hasil analisa data tersebut disimpulkan.

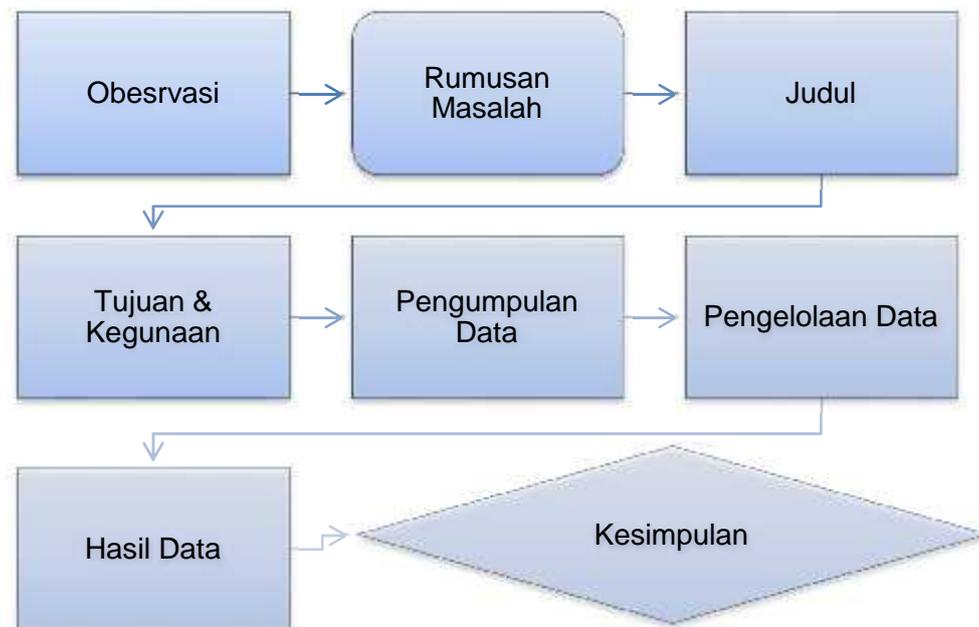
3.7 Pengecekan Validitas Data

Pengecekan validitas data menggunakan metode triangulasi yaitu dengan membandingkan hasil temuan A, B, dan seterusnya. Maka dengan hasil penelitian ini, untuk bisa dipertanggung jawabkan maka secara ilmiah diperlukan adanya pembuktian data untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Membandingkan hasil wawancara antara informasi satu dengan informasi lainnya.
2. Menggunakan bahan referensi, yaitu adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Gambar 3.3 Proses Tahap-Tahap Penelitian



Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah desain atau konsep untuk menyelesaikan penelitian sehingga dalam proses pengerjaannya dapat memberikan kelancaran penelitian, seperti pada penelitian ini ada beberapa proses tahap, yaitu:

1. Observasi

Pada tahap awal ini peneliti melakukan penindakan langsung pada lapangan atau mendatangi objek penelitian kemudian melakukan pengamatan menurut Indrawan dan Poppy (2016) mengartikan observasi data yang diamati adalah data yang terjadi saat ini, serta interview singkat terhadap apa saja masalah yang terjadi sehingga peneliti dapat menemukan rumusan masalah.

2. Menentukan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Dalam tahap kedua penelitian ini peneliti akan menetapkan rumusan masalah, kemudian mengangkat judul penelitian, dalam rumusan masalah ini peneliti akan mencari jawaban ataupun solusi sehingga akan

menghasilkan tujuan dari penelitian selanjutnya penelitian tersebut akan dapat memunculkan kegunaan penelitian, terutama kegunaannya dapat bermanfaat terhadap peneliti. Maka dari itu penelitian analisis penerapan dan realisasi anggaran belanja modal dapat memberikan informasi yang dapat menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi *solve problem* dalam dunia bisnis maupun akademik

3. Pengumpulan Data

Agar mengetahui jawaban atas suatu rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka perlu mengumpulkan data-data yang relevan. Oleh karena itu dalam tahapan ini peneliti melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tersebut, diantaranya dengan melakukan wawancara setiap staf-staf kantor KOMINFO BBPPKI Makassar khususnya staff keuangan, mendokumentasikan setiap kegiatan karyawan pada BBPPKI Makassar, melakukan observasi ke lokasi penelitian dengan melihat setiap kegiatan-kegiatan kerjanya serta mencari data dari sumber yang bersangkutan.

3. Pengelolaan Data

Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh, peneliti menggabungkan setiap data-data yang diperoleh untuk dikelola lebih lanjut dengan menganalisa informasi yang telah diperoleh.

4. Hasil Data

Dari hasil data yang didapatkan peneliti akan merangkum setiap data-data yang didapat dan menerapkan pokok permasalahan yang ditetapkan, pada akhir tahap ini semua data yang relevan diharapkan telah tersusun sesuai kebutuhan yang diperlukan. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan usaha peneliti untuk menyusun atau menyajikan tulisannya dari hasil data yang diperoleh pada penelitian, yang kemudian dianalisis sesuai kategori yang akan di bahas secara sistematis.

5. Kesimpulan

Dari hasil pengelolaan data dan proses penyusunan serta penyajian data, peneliti akan memahami dengan baik tentang hal-hal apa saja yang telah diperoleh dari hasil penelitian, sehingga peneliti memperoleh hal-hal penting dan kemudian dapat memberikan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang diangkat.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Penyusunan Anggaran Belanja Modal Pada KOMINFO BBPPKI Makassar

Dalam hal penyusunan anggaran belanja modal tidaklah dapat monyodorkan penetapan penyusunan rencana anggaran hanya dalam satu kategori saja yaitu anggaran belanja modal tapi harus dalam keadaan komprehensif maka dari itu penyusunan anggaran belanja modal tetap *include* dengan anggaran lain seperti anggaran belanja gaji dan belanja barang.

Pembahasan pertama yang akan dimulai dengan penjelasan penyusunan anggaran secara umum atau menyeluruh, seperti yang telah disampaikan oleh Informan kepada peneliti bahwa *pada periode sekarang dalam penyusunan penetapan anggaran dalam DIPA telah berbeda dengan periode lalu dimana pada masa ini money follow program bukan lagi program follow money, artinya tiap program yang diusulkan dalam DIPA tidak berindikator dari seberapa banyak kas negara akan tetapi pada periode ini adalah usulan rencana program apa saja asal dapat memberikan output kesejahteraan pada rakyat.* maka DIPA tersebut akan dipertimbangkan dengan evaluasi yang lebih detil tentang *output* yang akan diperoleh, serta pengukuran nilai apakah sebanding dengan tujuan dari UPT tersebut.

Adapun dampak negatif yang akan diberikan sistem ini kepada pemerintahan jika saja terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan penyetujuan anggaran yaitu dapat merugikan negara secara keuangan dikarenakan *feedback* yang tidak sesuai akibat tidak efektifnya dalam menjalankan perencanaan anggaran.

Adapun beberapa data yang diperoleh dari dokumen KOMINFO BBPPKI atas peraturan system anggaran yang baru tentang penganggaran berbasis kinerja.

Bahwa dengan terbitnya peraturan UU No.17 Tahun 2003 terkait perubahan system anggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, setiap rencana kerja yang akan dilaksanakan menyatakan bahwa dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memenuhi delapan tahapan yaitu:

1. Penetapan sasaran strategis

Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar mempunyai RENSTRA yang telah dijabarkan seperti tujuan, kebijakan, program, dan hasil yang akan diharapkan dalam kegiatan beserta keluaran yang diharapkan. RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar yang lengkap ini sudah dibuat pada bulan Februari tahun 2005 dan kemudian disempurnakan lagi pada bulan Januari 2010. Penyempurnaan RENSTRA pada tahun 2010 ini digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar untuk periode selanjutnya, dimana penyusunan dokumen ini digunakan untuk Rencana Kinerja Tahunan, Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Penetapan *outcome*, program, *output*, dan kegiatan.

Dari penelusuran dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dapat dilihat dengan rinci indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan kepala pelaksana anggaran (KPA). KPA sudah menetapkan indikator terhadap semua program dan setiap kegiatan yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang dibuat setiap awal mengusulkan anggaran, namun *outcome* kegiatan baru dibuatkan pada akhir tahun waktu pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan.

Setiap kegiatan rencana strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar sudah dijelaskan indikator utama untuk setiap program namun untuk indikator kinerja kegiatan belum terlihat dengan jelas.

4. Penetapan standar biaya.

Penetapan standar biaya ini disepakati oleh tim kerja program dan kepala bagian Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKI Makassar.

5. Penghitungan kebutuhan anggaran

Penghitungan kebutuhan anggaran pada sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggaran yang diperoleh oleh Kemkominfo BBPPKI Makassar mengikuti nilai dari DIPA yang diusulkan yang disebut *money follow program*

6. Pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan

Setelah proses penganggaran selesai maka Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen ini adalah dasar pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang

bersangkutan dan pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Dokumen pelaksanaan anggaran dituangkan dengan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang memuat tentang uraian fungsi/sub fungsi, rincian kegiatan/sub kegiatan, Jenis belanja, rencana penarikan dana, perkiraan penerimaan Kementerian/Lembaga. Dengan adanya DIPA, pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran di tiap Kementerian/Lembaga baru bisa menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ada di dalam DIPA dengan tetap pada jalur petunjuk operasional kegiatan (POK)

7. Pertanggung jawaban

Penggunaan dana terkait erat dengan pertanggung jawaban setiap dana yang digunakan. Hal ini merupakan suatu keharusan karena dana yang bersumber dari APBN. Dimana APBN ini adalah uang rakyat sehingga pengelolaannya harus benar dan jujur serta transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Apalagi pada saat ini tuntutan yang besar dari masyarakat agar pemerintah bisa mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel sehingga pertanggungjawaban harus jelas dan mudah untuk dipahami. Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictivevalue*, tepat waktu dan lengkap.

- b. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, *verifiability, netralitas*.
- c. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan
- d. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

8. Pengukuran dan evaluasi kinerja.

Setiap UPT diharapkan dapat membuat tiap laporan, maka semenjak tahun 2001 sudah diwajibkan UPT membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pada awal tahun 2001 LAKIP untuk pertama kalinya dibuat dan sudah dinyatakan bahwa kedepannya penganggaran yang dibuat yang diusulkan akan dinilai dari setiap LAKIP ini. Namun hal ini belum bisa terlaksana dengan baik karena adanya beberapa kendala. Ini dapat dilihat bahwa LAKIP baru sekedar laporan yang dikirimkan setiap tahunnya. LAKIP ini terus mengalami perkembangan dan perubahan sehingga jika dilihat secara prosesnya maka sudah mengalami penyempurnaan setiap tahunnya. Dalam LAKIP sudah digambarkan mengenai RENSTRA secara detail dan terkait dengan Rencana Kinerja Tahunan, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran setiap tahunnya.

Setelah dilihat uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerolehan dana anggaran diperlukan pondasi kuat yaitu seperti rencana strategis yang sangat wajar dan dapat diukur kebenarannya serta dalam penetapan biaya anggaran diperlukan harga yang wajar sebagaimana dalam kondisi pasar. Adapun pemerolehan anggaran yang tidak sesuai jalurnya seperti pemberian dana gelondongan tiap UPT dari keputusan Presiden untuk kejadian

khusus yang mana sebelumnya tidak diperkirakan, seperti yang dikatakan oleh informan dalam menanggapi pemerolehan dana anggaran diluar program yaitu dengan berjalannya program kerja KOMINFO BBPPKI ada masa pada tahun berjalan ada sebuah kebijakan internasional yang terjadi seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebab persaingan dalam sistem MEA akan berlangsung keras karena tenaga kerja profesional dan bersertifikat dapat menjadi nilai yang unggul pada dunia kerja maka sebab dari itu Presiden pada tahun 2015 mengeluarkan anggaran besar-besaran secara langsung kepada KOMINFO untuk pelatihan pemerolehan sertifikasi kompetensi khususnya pada bidang IT.

Maka hal dari penganggaran ini dan khususnya pada penetapan biaya tersebut akan disusun langsung oleh Menteri yang berkaitan dengan keputusan Presiden. Maka dapat dianalisis bahwa standar pelaksanaan anggaran dapat tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku jika adanya keputusan Presiden.

4.1.1 Pelaksanaan Program Belanja Modal

Dalam standarnya pelaksanaan akan dilakukan setelah anggaran diperoleh dan jika anggaran telah diperoleh maka ada indikator penunjang terealisasinya anggaran dan salah satunya adalah kebutuhan dalam kenyamanan kerja serta dalam kebutuhan peningkatan kinerja sesuai dengan informan Kementerian Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika yang menjabat sebagai staff akuntan mengungkapkan *hal pokok sebelum disusunnya perencanaan penyusunan anggaran tahun selanjutnya adalah meninjau kebutuhan pokok yang diperlukan dalam menunjang kinerja staff agar kedepannya tak ada lagi alasan untuk terhambatnya program kerja yang direncanakan*. Untuk dari itu ada proses yang berbeda dengan peraturan yang telah ditetapkan pada dalam siklus anggaran jika dilihat dari prosesnya, dan berikut siklus anggaran Kementerian

Komunikasi dan Informasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Informatika:

1. Tahap perencanaan anggaran.
2. Tahap penyusunan anggaran.
3. Tahap pengesahan anggaran.
4. Tahap pelaksanaan anggaran.
5. Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran.
6. Tahap pengesahan perhitungan anggaran.

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategis. Penyusunan rencana strategis dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik dan perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal. Pengukuran kinerja (tolak ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah adalah aspek laporan keuangannya.

Untuk melakukan satuan kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (*input*) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan, peran analisa standar biaya sangat diperlukan. Analisa standar biaya adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Kementerian komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar merupakan salah satu kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Dalam tindak lanjut pelaksanaan program belanja modal maka perlu dibentuk tim kerja khusus yang akan ditunjuk langsung oleh kepala KOMINFO BBPPKI, dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pengadaan barang, seseorang yang nantinya akan melaksanakan tugas dalam proses penentuan lokasi belanja dan pemilihan barang yang sesuai rencana anggaran dalam DIPA setelah itu diserahkan ke pejabat penerimaan barang dan kemudian dicek ulang seluruh hasil pengadaan yang dilakukan, untuk pejabat penerima barang adalah orang yang ditunjuk langsung oleh kepala BBPPKI. Sesuai dengan penyampaian yang diberikan oleh informan BBPPKI adalah *salah satu hal yang membuat suasana kerja menjadikan produktif adalah masa sebelum penunjukan pejabat pengadaan barang, sebab hal ini akan ditunjuk langsung oleh kepala BBPPKI dengan indikator motivasi kerja atau inisiatif kerja yang bagus serta memiliki sertifikat pelaksana pengadaan barang begitupun halnya dengan pejabat penerima barang yang harus memilikinya jika ingin terpilih.* Maka peluang untuk menjadi pejabat pengadaan sangatlah kecil jika tidak memiliki inisiatif kerja yang tinggi sebab kelebihan dari pelaksanaan ini adalah memberikan insentif lebih ke staff yang mengerjakannya.

Untuk siklus belanja modal secara teknis tidaklah sama dengan UPT yang lain sebab tiap UPT atau SATKER memiliki konsep tersendiri dalam

pelaksanaannya, sebab indikator yang membedakannya yaitu pada musim dan kondisi pasar. Untuk KOMINFO BBPPKI sendiri siklus pengadaan belanja modal yaitu:

1. Penunjukan tim kerja pengadaan

Penunjukan ini akan dilakukan oleh kepala KOMINFO BBPPKI dan pada saat penunjukan pejabat pengadaan ada syarat-syarat tertentu seperti yang disampaikan oleh informan bahwa *Untuk menentukan pejabat pengadaan maka diharuskan orang tersebut memiliki SK (Surat Keputusan), Sertifikat tertentu dan kinerja yang baik serta memiliki track record yang baik*, jadi untuk penunjukan ini memerlukan jam kerja yang lebih dikarenakan adanya penilaian kinerja. Dalam pembuatan tim pejabat pengadaan ini maka diwajibkan untuk melaksanakan pengadaan secara jujur dan transparan serta pejabat pengadaan barang ini akan dibantu alat e-katalog dalam pembelian barang dan jika barang yang dibutuhkan dalam e-katalog tidak tersedia maka akan mengadakan pengadaan langsung dengan partner kerja atau toko yang terpercaya.

2. Pengecekan pada e-katalog (Jika ada)

Selanjutnya dalam pelaksanaannya melakukan pengecekan pada e-katalog sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan jika barang atau spesifikasi tidak sesuai maka akan melakukan lelang.

3. Pelaksanaan lelang

Pelaksanaan lelang adalah tindakan yang dilakukan jika barang yang diadakan diatas 200 juta rupiah dan akan dilakukan dengan berbagai cara metode lelang seperti pembelian dengan harga 200 juta – 5 Milliar maka akan dilakukan lelang sederhana dan jika diatas 5 Milliar maka akan dilaksanakan lelang umum, yang membedakan kedua lelang ini hanyalah para pesertanya jika lelang sederhana peserta yang ikut

sifatnya terbatas atau tertentu dan sesuai dengan hasil lelang periode sebelumnya artinya pernah mengikuti kerja sama sebelumnya dan dipanggil lagi kesediaannya untuk berpartisipasi dan untuk lelang umum pesertanya bebas akan tetapi ada syarat yang tetap diikuti dan syarat utamanya yaitu *track record* yang baik tiap mengerjakan tender atau telah terpercaya.

4. Pemesanan atau pembelian

Hal ini telah dalam bentuk proses pengadaan artinya telah sesuai spesifikasi barang yang dibutuhkan jika dalam sudut pandang pejabat pengadaan barang.

5. Pembayaran barang/jasa

Setelah barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi maka selanjutnya melakukan transaksi menggunakan kas dan dalam pembayaran ini telah dipotong PPN dan PPH yang berlaku artinya barang yang dibeli telah murni harga tanpa pajak apapun.

6. Pengecekan barang

Dalam tahap akhir pejabat penerima barang melakukan pengecekan sesuai spesifikasi agar tidak terjadi kecurangan ataupun kekeliruan dalam pengadaan sehingga pengadaan yang terjadi dapat dipertanggung jawabkan sebaik mungkin.

4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Lelang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam Perpres No.4 pasal 1 ayat 23 (2015) metode pelelangan ada tiga yaitu:

1. Pelelangan umum

 Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pelelangan terbatas

 Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3. Pelelangan sederhana

 Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 Adapun pengadaan yang tidak memerlukan kegiatan lelang dikarenakan biaya yang dikeluarkan dibawah 200 juta rupiah seperti yang ada pada Perpres No.4 pasal 1 ayat 26 (2015) menjelaskan macam macam pengadaan yang sifat pembeliannya dibawah 200 juta rupiah yaitu:

1. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
2. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

4. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
6. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang yang sifatnya belanja modal maka akan ada pengeluaran biaya-biaya dimana biaya ini diartikan dalam ilmu akuntansi adalah pengorbanan materil atau sumberdaya untuk memperoleh barang/jasa. KOMINFO BBPPKI sendiri pengadaan yang dilakukan dengan nilai sampai 200 juta maka pengadaan akan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa informan menyatakan untuk mengadakan barang dilakukan melalui pengadaan langsung bila nilai dibawah 200 juta rupiah, dan melalui metode lelang umum atau lelang sederhana bila diatas 200 juta.

Secara teknis pengadaan barang yang dilakukan barang/jasa pada KOMINFO BBPPKI adalah sesuai dengan pernyataan informan yaitu dengan *menggunakan katalog elektronik (E-Catalogue) selama barang yang diadakan ada dalam katalog tersebut*, dalam peraturan pemerintahpun mengesahkan kegiatan *E-Purchasing* seperti yang ada dalam Perpres No.4 Pasal 1 ayat 40 (2015) tentang Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Jika barang yang direncanakan

tidak ada pada *E-Catalogue* maka sistemnya akan menggunakan sistem lelang atau penunjukan langsung.

Dilihat dari kegiatan teknis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran memprioritaskan pelaksanaan dengan menggunakan *E-Purchasing* yang telah disediakan oleh Pemerintah dan pada layanan tersebut akan menjabarkan kategori barang, Jenis, harga, dan klasifikasi barang sehingga dapat memudahkan pembelian serta penyedia barang tersebut telah terpercaya. Hanya saja pada pelaksanaan barang yang bersifat belanja modal tidaklah harus terus menerus melalui *E-Catalogue* dikarenakan ada kondisi-kondisi tertentu seperti pengadaan yang dilakukan yang memiliki jangka waktu singkat, barang yang diinginkan tidak ada pada layanan tersebut, penyedia barang tidak merespon baik, harga pada *E-Catalogue* lebih mahal dibanding pada toko, dan penyedia terkena sanksi administratif dan dihentikan sementara. Jadi dalam pengadaannya dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi tertentu serta tidak harus terikat dengan prosedur yang ditetapkan.

4.2 Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal

Dalam hal penganggaran pasti akan terjadinya realisasi dimana realisasi ini diukur melalui persentase realisasi untuk memperoleh efektifitasnya seperti yang dikatakan informan peneliti yaitu bapak Hosea menjelaskan bahwa dalam pengukuran efektivitas realisasi anggaran maka tiap unit kerja melaporkan hasil dari perencanaan anggaran yang dilakukan setelah itu dikomprehensifkan maka menghasilkan jumlah realisasi anggaran kemudian dibagi dengan nilai anggaran awal atau hasil revisi anggaran selanjutnya dikali seratus, Maka dari itu realisasi hanya berfokus pada nilai persentase dan SILPA sebab hal ini dapat mengacu pada kinerja UPT atau SATKER serta dapat berakibat untuk penganggaran tahun depan. Maka untuk melihat dan meninjau nilai tersebut haruslah dilihat pada PAGU DIPA.

**TABEL 4.1 LAPORAN PERINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

Program	Anggaran semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi belanja				Sisa anggaran	% Realisasi anggaran
			Bulan ini	Jumlah s/d bulan ini	Pengembalian s/d bulan ini	Jumlah neto s/d bulan ini		
perangkat pengelola data & komunikasi (996)	-	Rp190.330.000	-	Rp189.200.000	-	Rp189.200.000	Rp1.130.000	99%
peralatan & fasilitas perkantoran (997)	Rp60.000.000	Rp 60.000.000	-	Rp 59.235.000	-	Rp 59.235.000	Rp 765.000	98%
gedung/bangunan (998)	-	Rp179.800.000	Rp7.950.000	Rp174.600.000	-	Rp174.600.000	Rp5.200.000	97%
Jumlah Belanja	Rp60.000.000	Rp430.130.000	Rp7.950.000	Rp423.035.000	Rp -	Rp423.035.000	Rp7.095.000	98%

Sumber diolah: KOMINFO BBPPKI Makassar, 2017

Untuk belanja modal tahun 2015 disiapkan Pagu DIPA anggaran semula sebesar Rp60.000.000 setelah direvisi akibat dari adanya pemberian dana gelondongan dari pusat sebab untuk program pelatihan, pengembangan dan sertifikasi SDM bidang TI dikarenakan adanya kebijakan MEA saat tahun berjalan maka Presiden membuat keputusan dan akhirnya terjadinya revisi dan anggaran tersedia sebesar Rp 430,130,000 dimana pemberian diberikan sebesar Rp,370.130.000 dan inipun selisih antara anggaran semula dengan setelah revisi dan pada realisasi anggaran sebesar Rp 423,035,000 maka untuk persentase realisasi anggarannya rata-rata pada angka 98% yang berarti semua pekerjaan untuk belanja modal sudah cukup baik dalam perencanaan belanja modal.

**TABEL 4.2 LAPORAN PERINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

Program	Anggaran semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi belanja			Sisa anggaran	% Realisasi anggaran
			Bulan ini	Jumlah s/d bulan ini	Jumlah neto s/d bulan ini		
perangkat pengelola data & komunikasi (996)	Rp66.000.000	Rp66.000.000	Rp 64.680.000	Rp64.680.000	Rp 64.680.000	Rp1.320.000	98%
Jumlah Belanja	Rp66.000.000	Rp66.000.000	Rp 64.680.000	Rp64.680.000	Rp 64.680.000	Rp1.320.000	98%

Sumber diolah: KOMINFO BBPPKI, 2017

Untuk belanja modal disiapkan Pagu DIPA per 31 Desember 2016 anggaran awal sebesar Rp66.000.000 setelah direvisi anggaran masih tetap dan tersedia sebesar Rp66.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp64.680.000 yang berarti persentase realisasi anggaran sebesar 98% dan semua pekerjaan untuk belanja modal sudah sangat baik terhadap program perencanaan belanja modal tahun 2016.

Dilihat dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2015 sampai 2016 berjalan sangat baik dikarenakan persentase menunjukkan rata-rata 98% dan untuk pada tahun 2015 dimana pada periode tersebut ada revisi akibat MEA dan realisasinya pun masih tetap berjalan baik sehingga untuk efektifitas penganggarannya sangat baik untuk secara keseluruhan dan tetap pada rata-rata 98%.

Penanganan pelaksanaan belanja modal yang kemudian dituangkan pada realisasi belanja modal yang berjalan baik berindikator dari perencanaan strategi yang baik seperti yang dinyatakan informan bahwa pemerolehan kinerja yang baik akibat dari pengalaman serta insentif yang lumayan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian dalam pembahasan yang ada diatas maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan terhadap UPT yang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan anggaran indikator utama yaitu kebutuhan dan sejalan dengan Visi Misi Entitas
2. Dalam perencanaan pengadaan dibutuhkan SDM yang telah bersertifikat dan kompeten dalam pembelian barang agar dalam pelaksanaannya dapat memilih pejabat penyedia barang dan penerima barang
3. Siklus dalam penganggaran pada KOMINFO BBPPKI ada 6 yaitu:
 - 1) Tahap perencanaan anggaran.
 - 2) Tahap penyusunan anggaran.
 - 3) Tahap pengesahan anggaran.
 - 4) Tahap pelaksanaan anggaran.
 - 5) Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran.
 - 6) Tahap pengesahan perhitungan anggaran.
4. Realisasi anggaran belanja modal untuk tahun 2015 sampai 2016 mencapai rata-rata persentase keberhasilan pengadaan sebesar 98%.

5.2 Saran

A. Bagi Instansi

Untuk dalam proses anggarannya diharapkan kedepan sesuai dan sama dengan UPT lain agar dalam pengauditannya/Evaluasi kinerjanya mudah dilaksanakan serta adanya target presentase pencapaian anggaran tiap bulan agar dapat mengukur kemampuan UPT serta dapat memahami kendala dibulan bulan tertentu.

B. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel tambahan seperti efektivitas atau mengaitkan pengaruh antara variabel A dan variabel B sehingga dapat memunculkan penelitian terbaru.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah pemerolehan data sehingga hanya dapat menggunakan variabel tertentu serta peneliti sangat memiliki waktu terbatas untuk melakukan interview terhadap informan sehingga peneliti hanya dapat melakukan interview di waktu tertentu adapun keterbatasan dalam akses data pada jendela LKPP sehingga peneliti merasa kurang maksimal dalam memaparkan *E-Catalogue*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Allen, Richard & Tommasi, Danniell. 2012. *Managing Public Expenditure : A Reference Book For Transition Countries*. Paris: OECD
- Anastasia Friska Palilingan dkk. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado
- Ardiprawiro. 2015. Manajemen Keuangan. Bekasi: Universitas Gunadarma
- Bastian & Indra. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Grace Yunita Liando & Ingriani Elim. 2016. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Horne, James Van C dan John M Wachowicz. 2012. *Fundamental Of Financial Management*. Edisi Kedua Belas. Jakarta : Salemba Empat.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kominfo Pasal 3 Tahun 2011. Tentang Tugas BBPKI.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 No. 05. 2007. Tentang Bagan Akun Standar.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Dana Perimbangan
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 43. 2015. Tentang Lelang.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mardiasmo. 2012. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2012. Anggaran. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Nordiawan & Hertianti. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ramlah Basri. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi

Rizal Y. Budiman & Heince Wokas. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara.

Riza Al Fahroby. 2015. *E Procurement* Banyuwangi: LPSE

Rully Indrawan & Yuniawati Poppy. 2016. Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama

SAP. 2010 .Tentang Definisi Belanja Modal

Syaiful. 2013. "Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan". Diambil Dari [Http://Www.Ksap.Org/Riset&Artikel/Art16.Pdf](http://www.ksap.org/riset&artikel/art16.pdf). Pada Tanggal 24 Juli 2016.

LAMPIRAN

Nama Peneliti : Hasan Hamzah
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada KOMINFO BBPPKI Makassar

Nama Informan : Rohana
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan
Nama Informan : Hosea Riman
Jabatan : Akuntan Pajak KOMINFO BBPPKI

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada staff

1. Bagaimana Proses Penganggaran belanja modal ?
2. Apa saja indikator untuk merancang belanja modal ?
3. Apakah ada batasan tertentu untuk pengadaan belanja modal ?
4. Apa saja hambatan dalam pengadaan belanja modal ?
5. Apa saja hal yang menjadi kendala dalam penyusunan anggaran ?
6. Bagaimana proses pengadaan barang bersifal belanja modal secara teknis ?
7. Bagaimana teknis pengadaan baran secara lelang ?
8. Apa saja fasilitas pemerintah dalam pengadaan barang secara lelang ?
9. Hal apa yang membatalkan pengadaan barang secara lelang ?
10. Siapa yang berhak membatalkan pengadaan lelang ?
11. Apa dasar hukum yang mengatur penganggaran modal ?
12. Siapa yang menyusun anggaran ?
13. Siapa yang melakukan belanja barang ?

Dokumentasi Wawancara dengan Pak Hosea



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

Tahun Anggaran 2015

NOMOR : DIPA- 059.06.2.432716/2015

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

rian Negara/Lembaga : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 anisasi : (06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 : (19) SULAWESI SELATAN
 ma Satker : (432716) BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

Halaman : III. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLA H SELURU H
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUN I	JUL I	AGUSTUS	SEPTEMBE R	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32716	BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR													
	RENCANA PENARIKAN DANA	391.172	548.495	783.269	1.123.174	1.146.491	1.427.124	2.078.366	2.047.626	2.139.087	2.028.393	2.232.648	2.708.745	18.654.590
	51 BELANJA PEGAWAI	265.301	269.390	293.466	373.420	358.429	551.499	429.297	396.589	535.599	263.030	400.677	406.128	4.542.825
	52 BELANJA BARANG	125.871	279.105	489.803	749.754	788.062	875.625	1.520.030	1.478.985	1.603.488	1.636.324	1.831.971	2.302.617	13.681.635
	53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	5
06.04.303 5	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI	391.172	548.495	783.269	1.123.174	1.146.491	1.427.124	2.078.366	2.047.626	2.139.087	2.028.393	2.232.648	2.708.745	18.654.590
	51 BELANJA PEGAWAI	265.301	269.390	293.466	373.420	358.429	551.499	429.297	396.589	535.599	263.030	400.677	406.128	4.542.825
	52 BELANJA BARANG	125.871	279.105	489.803	749.754	788.062	875.625	1.520.030	1.478.985	1.603.488	1.636.324	1.831.971	2.302.617	13.681.635
	53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	5
								129.039	172.052		129.039			430.130

Jakarta, 14 November 2014
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

ttd.
 Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, M.A
 NIP 196010221989031002

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	66,000,000	66,000,000	64,680,000	64,680,000	0	64,680,000	98.00	1,320,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3035.996	66,000,000	66,000,000	64,680,000	64,680,000	0	64,680,000	98.00	1,320,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3035	7,130,962,000	6,937,312,000	6,212,452,388	6,212,452,388	(13,626,368)	6,198,826,020	89.55	738,485,980
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.09.04	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04.09	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 04	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	10,813,570,000	10,288,443,000	9,285,100,988	9,285,100,988	(13,626,368)	9,271,474,620	90.25	1,016,968,380

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NOMOR : DIPA- 059.06.2.432716/2016

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

rian Negara/Lembaga : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 anisasi : (06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 : (19) SULAWESI SELATAN
 ma Satker : (432716) BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2716	BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR													
	RENCANA PENARIKAN DANA	332.301	465.456	511.319	702.496	702.342	942.514	1.077.442	1.026.008	1.224.131	949.213	1.175.064	1.180.157	10.288.443
	51 BELANJA PEGAWAI	280.691	285.017	310.490	395.082	379.221	583.491	454.200	419.595	566.669	278.288	423.920	236.038	4.612.702
	52 BELANJA BARANG	51.610	114.439	200.829	307.414	323.121	359.023	623.242	606.413	657.462	670.925	751.144	944.119	5.609.741
	53 BELANJA MODAL	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000
04.3035	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI	332.301	465.456	511.319	702.496	702.342	942.514	1.077.442	1.026.008	1.224.131	949.213	1.175.064	1.180.157	10.288.443
	51 BELANJA PEGAWAI	280.691	285.017	310.490	395.082	379.221	583.491	454.200	419.595	566.669	278.288	423.920	236.038	4.612.702
	52 BELANJA BARANG	51.610	114.439	200.829	307.414	323.121	359.023	623.242	606.413	657.462	670.925	751.144	944.119	5.609.741
	53 BELANJA MODAL	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000

ESELON I : 06 **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROPINSI : 1900 **SULAWESI SELATAN**
SATUAN KERJA : 432716 **BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA MAKASSAR**
JENIS SATUAN KERJA : KD **KANTOR DAERAH**

Kode Lap. : LRBSB 02
 Tanggal : 11 Januari 2016
 Halaman : 11
 Prog.Id : lu_lrabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	60,000,000	60,000,000	0	59,235,000	0	59,235,000	98.73	765,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3035.997	60,000,000	60,000,000	0	59,235,000	0	59,235,000	98.73	765,000
998	Gedung/Bangunan								
53	BELANJA MODAL								
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	179,800,000	7,950,000	174,600,000	0	174,600,000	97.11	5,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	179,800,000	7,950,000	174,600,000	0	174,600,000	97.11	5,200,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	179,800,000	7,950,000	174,600,000	0	174,600,000	97.11	5,200,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3035.998	0	179,800,000	7,950,000	174,600,000	0	174,600,000	97.11	5,200,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3035	6,575,605,000	6,945,735,000	731,705,685	6,266,634,906	(12,234,831)	6,254,400,075	90.22	691,334,925
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04.10.04	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04.10	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 04	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	9,854,590,000	18,654,590,000	1,840,325,327	16,930,279,219	(13,944,831)	16,916,334,388	90.76	1,738,255,612